

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi menjadi sarana bagi para politikus dan aktor-aktor politik dalam mengejar kepentingannya. Para politikus dan aktor politik menyampaikan pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, serta untuk mempengaruhi masyarakat umum disebut sebagai komunikasi politik. Komunikasi politik ialah suatu kegiatan komunikasi yang mempunyai akibat terhadap sistem politik (Subiakto dan Rachmah, 2012:20).

Dalam proses politik, komunikasi politik memegang peranan penting untuk mempermudah penyampaian pesan-pesan politiknya. Bagi masyarakat, komunikasi bisa menjadi alat untuk menyampaikan aspirasi. Bagi aktor-aktor politik, komunikasi bisa menjadi alat untuk meraih simpati. Bagi pemerintah, komunikasi bisa menjadi alat untuk menyampaikan kebijakan atau situasi terkini kepada masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik juga memiliki peran penting yang tidak diragukan lagi dalam ranah politik yaitu sebagai alat kepentingan politik bagi seluruh kalangan masyarakat.

Komunikasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui media massa. Didalam masa Pemilihan Umum (Pemilu) misalnya, komunikasi politik dilakukan oleh beberapa politisi untuk bersaing dengan lawannya. Cara ini dilakukan untuk merebut atau mempengaruhi hati para konsituennya agar dapat memenangkan pemilu tersebut. Didalam beberapa kesempatan berkomunikasi politik, pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang memegang

kekuasaan dapat melakukan komunikasi politik untuk menyampaikan kebijakan atau situasi-situasi terkini dari negaranya kepada masyarakat umum.

Dengan demikian, komunikasi politik pada umumnya memiliki lima unsur yaitu komunikator politik, pesan politik, media politik, target politik, dan efek komunikasi politik. Unsur tersebut memiliki komponen yang saling terkait, sehingga dapat menentukan berhasilnya suatu proses komunikasi yang terjadi dilakukan oleh komunikator politik. Dalam unsur komunikator politik yang dimaksud adalah orang yang bercita-cita atau memegang jabatan pemerintah dan memang berkomunikasi tentang politik. Menurut Nimmo, komunikator politik dikategorikan dalam tiga klasifikasi yaitu politikus, professional, dan aktivis (Subiakto dan Rachmah, 2012:24).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, saluran media massa yang digunakan dalam komunikasi politik juga terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Jika dahulu komunikasi politik dilakukan melalui media massa seperti majalah, tabloid, koran, berpidato, dan aksi kampanye secara langsung. Di era teknologi digital, komunikasi politik mulai memasuki era baru dengan berbagai komunikasi politik yang dapat dengan mudah disampaikan melalui media online, media cetak, media sosial, ataupun pada laman berita dalam jaringan (Indrawan, 2020:9).

Media massa memang memegang peranan penting dalam pembentukan citra secara massif dimasyarakat, hal ini disebabkan oleh kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh media massa dalam membuat, menggerakkan, atau membalikkan opini publik. Hal ini dikenal dengan istilah metode *framing*

atau membingkai. Pada dasarnya, metode *framing* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkonstruksi suatu fakta berdasarkan pemahaman dan interpretasi suatu media. Hal ini berarti, ketika suatu media melakukan *framing* atas suatu peristiwa, media akan memfokuskan narasi ke suatu aspek tertentu dalam menyajikan peristiwa tersebut (Eriyanto, 2002:10). Umumnya, media massa atau pers menerapkan metode *framing* ketika meliput peristiwa-peristiwa berskala nasional, seperti terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berita politik terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU), maupun pemberitaan terkait gerakan separatis di beberapa daerah di Indonesia.

Alasan utama mengapa media massa menggunakan *framing* adalah karena *framing* mampu mengkonstruksi suatu peristiwa secara berbeda. Dalam fenomena atau fakta yang sama, *framing* akan menghasilkan interpretasi serta kesan yang berbeda jika menggunakan kosakata dan tulisan yang berbeda. Maka dari itu, *framing* biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga berita menjadi lebih menarik, informatif, dan hal tersebut secara otomatis akan membuat masyarakat tertarik untuk membaca. Menurut Eliya mengemukakan bahwa khususnya pada berita seputar politik yang biasanya akan terlalu formal sehingga masyarakat tidak memiliki ketertarikan dalam membaca berita seputar politik. Dengan adanya *framing*, berita politik dikemas secara baik dengan tagline berita yang membuat masyarakat ingin membaca berita tersebut (Eliya, 2019:27).

Metode *framing* sendiri bertujuan membentuk informasi sedemikian rupa sehingga media massa menciptakan makna, citra, dan kesan tertentu yang

diinginkan agar khalayak dapat memahami. Pembingkaiian atau *framing* merupakan langkah yang digunakan media massa untuk membelokkan masalah yang terjadi sebenarnya menjadi persoalan lain sehingga memiliki makna berbeda (Afnan, 2018:5). Teknik *framing* ini pada akhirnya digunakan oleh media untuk menciptakan konten yang tidak sesuai fakta sebenarnya dengan cara menyunting dan mengedit tulisan, gambar, dan lain sebagainya untuk disebarluaskan ke masyarakat.

Dalam melakukan analisis terhadap metode *framing* yang dilakukan oleh media, terdapat empat model, yakni model Murray Edelman, model Robert Entman, model William A. Gamson, serta model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Eriyanto mengemukakan secara lebih lengkap terkait perbedaan dari masing-masing model. Dalam model Edelman, *framing* dikaitkan dengan sistem kategorisasi atau klasifikasi. Seluruh aspek yang berkaitan dalam peliputan peristiwa tersebut telah diarahkan agar sesuai dengan kategori atau klasifikasi yang dibuat oleh media.

Sedangkan model Entman, *framing* sebuah proses pemilihan dan menyoroti aspek-aspek seperti menempatkan informasi dalam konteks yang unik sehingga beberapa masalah mendapatkan alokasi lebih banyak daripada yang lain. Model Gamson, *framing* adalah metode untuk menentukan bagaimana opini digunakan oleh jurnalis ketika memilih topik dan menulis sebuah berita. Model keempat, model Pan dan Kosicki, *framing* adalah pesan yang menonjol agar dapat memberikan lebih banyak informasi daripada yang lain sehingga publik lebih fokus pada pesan tersebut (Eriyanto, 2002:155-267).

Berdasarkan empat model *framing* yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa dalam konteks komunikasi politik, *framing* dipandang sebagai cara media dalam membingkai atau mengemas berita untuk mempengaruhi cara khalayak dalam menginterpretasikannya. Untuk itulah, perlu dilakukan analisis *framing* guna melihat dan mengidentifikasi adanya realitas yang dibingkai dan dipublikasikan oleh media atas kasus tertentu (Muzakkir, 2017:183).

Dalam komunikasi politik, *framing* dimaknai sebagai sebuah proses yang mencakup dalam unsur komunikasi yaitu adanya unsur pesan yang tertuang kedalam media yang dikenal dalam media politik. *Framing* memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik dimana terdapat konstruksi realitas politik yang bertujuan pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik.

Konstruksi tersebut sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan atau pihak yang memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, *framing* menyediakan ruang atau waktu bagi media massa atau pers dalam menggiring opini publik kedalam sebuah peristiwa politik guna memperoleh perhatian dari publik (Muzakkir, 2017:190).

Media massa atau pers sebagai salah satu unsur struktur politik yang memaknai apakah pers memiliki kekuatan terlibat dalam upaya memperoleh kekuasaan sekaligus mempengaruhi pembentukan opini publik. Dalam komunikasi politik terdapat pesan yang disampaikan melalui media massa sehingga berperan penting dalam proses politik. Bahkan menjadi aktor utama dalam bidang politik dimana setiap yang memiliki kepentingan politik, baik

personal maupun kelompok, tidak terlepas dari media sebagai instrument kegiatannya.

Media selalu ada dan menjadi saluran komunikasi dalam konteks berpolitik yang terhubung dalam tiga aktor politik media yaitu politisi, jurnalis, dan masyarakat (Hajad, 2016:4). Komunikasi politik sangat dibutuhkan dalam terjadinya proses politik. Apalagi, proses politik cenderung terbagi dalam beberapa kelompok sehingga upaya komunikasi politik yang dilakukan melalui media massa tak jarang dilakukan *framing* untuk mengunggulkan pihak tertentu (Rachmiatie, dkk, 2013:124).

Selain definisi *framing* seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini juga akan menggunakan konsep *framing* komunikator politik. Adapun definisi yang digunakan memiliki sedikit perbedaan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa *framing* merupakan proses konstruksi realitas politik yang bertujuan pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik.

Sedangkan, *framing* komunikator politik merupakan konstruksi pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik, sehingga pesan politik tersebut ditafsirkan oleh penerima sesuai dengan keinginan komunikator politik (Sodikin, 2014:54). Dalam *framing* komunikator politik, peran komunikator politik adalah sebagai pendukung argumentasi yang dibutuhkan untuk menonjolkan suatu isu tertentu. Jika dilihat dalam pemberitaan konflik KKB yang diangkat dalam penelitian ini, komunikator politik merupakan aktor-aktor politik yang terlibat sebagai narasumber pada pemberitaan tersebut. Aktor

politik tersebut kemudian menyampaikan sebuah konstruksi pesan politiknya melalui saluran atau media pemberitaan dan ditafsirkan oleh masyarakat sesuai dengan keinginan aktor sebagai komunikator politik.

Adapun komunikator politik yang berperan dalam pemberitaan media Fajarpapua.com terkait konflik KKB antara lain adalah Kabid Humas Polda Papua, Kapolres Puncak, Presiden RI, Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol, Kapolda Papua, Kasatgas Humas Nemengkawi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI, hingga Komandan Korem PVB Brigadir Jenderal TNI.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisa *framing* komunikator politik, dan tidak hanya terbatas pada *framing* pemberitaan konflik KKB yang dilakukan oleh media massa, namun pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh komunikator politik dapat digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi suatu isu sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh komunikator politik tersebut. *Framing* media terhadap pesan politik yang dilakukan komunikator politik dalam pemberitaan konflik KKB menjadi suatu hal yang penting pada komunikasi politik.

Framing dilakukan juga di dalam kasus konflik yang ada di Papua. Salah satunya yang telah lama menjadi perhatian nasional maupun internasional adalah konflik separatisme di Papua. Menurut Elisabeth mengemukakan bahwa

dalam kasus separatisme Papua, terdapat tiga aktor utama yang terlibat, yakni aktor lokal, aktor nasional, serta aktor internasional (Elisabeth, 2016:44-45).

Masih menurut Elisabeth adapun aktor lokal yang dimaksud adalah para tokoh adat serta masyarakat Papua yang terus mengusahakan kemerdekaan Papua. Aktor nasional yang terlibat adalah pemerintah daerah Papua, pemerintah pusat, serta institusi-institusi negara lainnya seperti pihak kepolisian dan TNI. Sedangkan, aktor internasional yang terlibat dalam isu ini adalah organisasi-organisasi internasional serta negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua, contohnya Vanuatu, Kepulauan Solomon, serta beberapa negara yang mendukung pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara, seperti Fiji dan Papua Nugini. Dengan perhatian internasional yang terpusat pada isu separatisme Papua mendorong pemerintah Indonesia untuk memperbaiki citra di mata masyarakat nasional maupun masyarakat dunia melalui usaha-usaha penyelesaian konflik dan metode *framing* yang dilakukan oleh media saat meliput isu tersebut (Elisabeth, 2006:63).

Salah satu contoh konflik yang mampu mengundang banyak perhatian publik nasional dan peristiwa besar terjadi di Papua sepanjang tahun 2021 adalah peristiwa konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Peneliti memilih tahun 2021 dikarenakan di tahun ini gencarnya berita tentang KKB dan KKB di tahun tersebut banyak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap kalangan sipil seperti guru, siswa, tukang ojek, masyarakat biasa, tenaga kesehatan, karyawan, hingga personel TNI dan Polri jadi korban.

Konflik separatisme di Papua sendiri merupakan konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sejak tahun 1969, yang diawali oleh usaha menganulir hasil Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA (Nainggolan, 2014:181).

KKB adalah sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM). Dahulu sejak Papua masih ditangan Belanda, TNP-OPM sebelumnya dinamakan sebagai *Papuan Volunteer Corps* (PVK). PVK merupakan para militer yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda, ada sebanyak 450 anggota PVK satu-satunya kelompok orang Papua Barat dari berbagai macam suku yang dilatih oleh Belanda hingga membuat mereka membangkang pada Belanda.

Semenjak Perjanjian New York tahun 1963 mengamanatkan agar Papua diserahkan ke Indonesia lewat PBB. Sesaat setelah itu PVK diambil ahli oleh Komandan Frits Awom. Lalu kedatangan para perwira Indonesia justru tidak meningkatkan kesetiaan PVK terhadap Jakarta. Menurut Cameron Komisaris Divisi Manokwari, motif pemberontakannya adalah ketidakpuasan mendalam PVK terhadap situasi diwilayah tersebut. Pemicu pemberontakan dimana bentroknnya antara sejumlah pasukan PVK dan Tentara Indonesia. Tuntutan utama PVK adalah pengusiran seluruh rakyat Indonesia (Saltford,2003:61-63).

Dengan meningkatnya motif ketidakpuasan orang Papua menyebabkan pada tahun 1965 berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemimpin OPM dan mantan sersan PVK Frits Awom, memimpin beberapa ratus orang untuk menyerang barak Batalyon 641 di Arfak, Manokwari. Pada bulan April 1967,

orang Indonesia secara terang-terangan telah menembaki dan menewaskan sebanyak empat puluh orang sebagai tanggapan atas Awom yang mendeklarasikan “Negara Papua Merdeka”.

Pada tahun yang sama, Johan Ariks dari kepala suku lokal Arfak, ditangkap oleh para militer setelah memimpin kampanye gerilya selama dua tahun di daerah tersebut dan meninggal di dalam penjara pada tahun 1969. Szudek menuliskan untuk orang-orang yang pro Papua dan Anglo-Melanesian pada tahun 1968, memberitahu kepada mereka tentang kekacauan yang terjadi. Di Lembah Baliem Pegunungan Jayawijaya tahun 1966, ada sekitar 80 laki-laki umur 10 tahun ditembak oleh Tentara di desa Gulunu dan seorang anak laki-laki digantung di depan umum. Dengan alasan mereka tidak mengakui mereka Indonesia, mereka hanya mengakui mereka orang Papua.

Kemudian di Manokwari dan Teminabuan ada 15 laki-laki di gantung oleh tentara militer 1967, termasuk tentara Papua yang bernama Nico Jakadewa dan sejumlah tentara Papua. Di Ayamaru bulan Februari 1967, tentara terus melakukan operasi militer dan bom di desa-desa yang ada di Papua. (Saltford, 2003:79-80).

OPM ini melakukan pemberontakan dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan, dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat. Dengan tujuan ingin Papua merdeka, lepas dari bagian NKRI. Dasar tujuannya pun disebabkan adanya ketidakadilan dan perlakuan negara terhadap masyarakat orang asli Papua (OAP) dengan alokasi sumber daya yang tidak seimbang antara Papua dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia

tampaknya dibuat kelimpungan dengan demonstrasi, pembentukan opini publik yang menyatakan masyarakat Papua tertindas, pengibaran simbol bintang kejora, dan upaya pencarian dukungan internasional yang dilakukan OPM.

Berbagai upaya tersebut merupakan upaya OPM untuk mendapatkan pengaruh politik. Namun demikian, OPM juga melakukan upaya perjuangan bersenjata untuk merongrong negara Indonesia. Berbagai teror penembakan yang terjadi di Papua yang ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia dapat dimaknai sebagai wujud perlawanan OPM terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ilmar, 2017:84). Jika dahulu sampai saat ini OPM masih melakukan perlawanan kepada Tentara Indonesia, namun sekarang OPM melakukan perlawanan juga terhadap warga sipil. Hal ini karena OPM merasa curiga terhadap warga sipil sebagai mata-mata Pemerintah Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, perlawanan bersenjata OPM diberi label KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Label KKB terhadap OPM tersebut telah memposisikan kegiatan separatis OPM menjadi kegiatan kriminal biasa dimana pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 29 April 2021 Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh OPM merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

KKB merupakan kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua. Oleh karena itu, KKB dapat disebut sebagai gerakan separatisme yang gerakannya kerap memakan korban jiwa (Edon, dkk, 2021:855). Adapun kedua pihak politik yang terlibat dalam

konflik tersebut adalah pihak KKB selaku pihak yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pihak pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berusaha mempertahankan kedaulatan negara.

Temuan peneliti terhadap pemberitaan media massa lokal di Papua yang memberitakan peristiwa KKB dilakukan oleh Arfaknews.com, Bintangpapua.online, Beritapapua.id, Ceposonline.com, Fajarpapua.com, Jubi.co.id, Kapabar.com, Matapapua.com, Monitorpapua.com, Papuapos.com, Pasificpos.com, Papuainside.com, Papuabaratoke.com, Papuaselatanpos.com, Papua Baratnews.co, Papuaupdate.com, Papuaakita.com, Papuachannel.com, Papuadalamberita.com, Radarpapua.com, Suarapapua.com, Salampapua.com, Seputarpapua.com, Tribunpapua.com, dan Tribunpauabarat.com. Namun dari beberapa media massa lokal yang telah disebutkan, media online lokal yang paling gencar memberitakan peristiwa konflik KKB di Papua adalah Fajarpapua.com.

Selain gencar dalam memberitakan, menurut data yang disajikan data *traffic* web oleh Alexa.com menyebutkan bahwa Fajarpapua.com saat ini telah menjadi media online dengan pembaca terbanyak di Papua dengan menempati peringkat satu, menjadi pembaca terbanyak kedua di seluruh media online Papua, serta merupakan media online yang fokus membahas berita tentang peristiwa kriminal, politik, dan hukum.

Alasan peneliti memilih media *online* lokal Papua karena konflik KKB ini terjadi di Tanah Papua, sehingga peneliti ingin melihat dari sudut pandang media Papua. Hal ini dapat menunjukkan kehadiran media Papua sendiri dalam

memberitakan konflik KKB dengan cara penyampaian secara detail yang akan berpengaruh dalam menuliskan dan menyajikan berita.

Selanjutnya, peneliti memilih media *online* dikarenakan dapat dengan mudah diakses dari mana saja dan kapan saja, selain itu proses penyebaran informasinya yang sangat cepat. Berdasarkan temuan peneliti, media *online* Fajarpapua.com ini terkait kecepatannya menyampaikan informasi dalam sehari media ini mengunggah pemberitaan konflik KKB secara berkala satu hingga tiga berita.

Peneliti menemukan sepanjang tahun 2021 Fajarpapua.com merupakan media *online* lokal yang terus aktif memperbarui berita terkait peristiwa konflik KKB di Papua. Adapun pemberitannya pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pemberitaan Konflik KKB Sepanjang Tahun 2021 Pada Fajarpapua.com

Provinsi	No.	Kabupaten	Pemberitaan
Provinsi Papua	1.	Jayapura	1
	2.	Mappi	1
	3.	Paniai	1
	4.	Asmat	2
	5.	Kepulauan Yapen	2
	6.	Nduga	4
	7.	Nabire	6
	8.	Mimika	14
	9.	Pegunungan Bintang	18
	10.	Yahukimo	22
	11.	Intan Jaya	28
	12.	Puncak	74
Provinsi Papua Barat	1.	Maybrat	2
	2.	Teluk Bintuni	2
	Total Pemberitaan		177

Sumber : Hasil Penelitian Pada Portal Berita Fajarpapua.com
Diakses 25 Maret 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa total keseluruhan pemberitaan konflik KKB sepanjang tahun 2021 di Fajarpapua.com adalah 177 pemberitaan. Namun dapat

dilihat pula pada Kabupaten Puncak yang pemberitaannya paling banyak diberitakan yaitu sebanyak 74 berita.

Dari temuan peneliti 74 pemberitaan tersebut terdapat beberapa peristiwa yang terjadi seperti KKB membakar fasilitas yaitu sekolah, perumahan guru, puskesmas, helikopter. Selain itu menembak, membantai, menyandera warga sipil, hingga melakukan baku tembak dengan TNI-POLRI. Dengan ini, peneliti memilih untuk meneliti lebih dalam 18 pemberitaan mengenai topik KKB dan TNI-POLRI baku tembak.

Dalam menganalisis studi kasus permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Robert Entman. Model ini dipilih sebab dengan menggunakan empat elemen model Robert Entman seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana suatu peristiwa tersebut melalui seleksi dan peristiwa tersebut lebih menonjol oleh media yang akan dianalisa dalam penelitian ini, yakni media *online* Fajarpapua.com.

Selain itu, model Robert Entman umumnya digunakan untuk menganalisis liputan media terhadap isu-isu berskala nasional dan internasional, sebab kemampuan model tersebut untuk menganalisis *the power of communication text* atau kekuatan dari metode komunikasi melalui tulisan atau narasi, seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini (Anggoro, 2014:31-32).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dengan judul *Framing* Komunikator Politik Model Robert

Entman Pada Pemberitaan Konflik KKB di Kabupaten Puncak Oleh Fajarpapua.com 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana *framing* komunikator politik model Robert Entman pada pemberitaan KKB di Kabupaten Puncak oleh Fajarpapua.com 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini sebagai berikut untuk mengetahui *framing* komunikator politik model Robert Entman pada pemberitaan KKB di Kabupaten Puncak oleh Fajarpapua.com 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Ada pun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi pengembangan inovasi dan motivasi bagi mahasiswa dalam bidang ilmu komunikasi. Khususnya dalam kajian analisis *framing* dan kajian komunikasi politik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi media massa lokal dan mahasiswa jurnalistik dalam melihat sebuah peristiwa yang

berkaitan dengan isu konflik, politik, dan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Redaksi Fajarpapua.com yang berada di Jl. Belibis, Kota Timika, Provinsi Papua.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan tatakala penelitian, serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian dan sebuah konsep teori-teori sistematis yang relevan dengan variabel penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan variabel penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan gambaran hasil penelitian dan analisa secara kualitatif.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan didasarkan pada rumusan masalah yang ada pada